



Efektivitas Implementasi e-Budgeting dalam Mewujudkan Good Governance dengan Model CIPP (Studi Kasus pada Kota Surabaya)

Iqbal Rafiqi, Nur Hidayah Selviyanti, Istianah, Layyinah, Siti Halimah, Nur Eka Muthmainnah, Dianawati, Nurul Annisa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan
Iqbalrafiqy96@gmail.com

Abstraks

Posisi EDGI di Indonesia berada pada kisaran 0,25 - 0,58 (middle-EDGI) atau disebut dengan indeks pembangunan menengah, hal tersebut tentunya menjadi tuntutan kepada pemerintah untuk menemukan solusi yang handal. Seiring dengan perkembangan era industry 4.0. Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis mengetahui efektifitas implementasi e-budgeting, proses operasionalnya dan bagaimana evaluasi dalam pemenuhan asas good governance dengan metode CIPP. Metode kualitatif deskriptif menjadi metode dalam penelitian ini dengan tujuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menafsirkan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Dalam penelitian kualitatif deskriptif ini melalui penilaian model CIPP (Context, Input, Process dan Product) dalam mewujudkan good governance yang dilakukan dengan, planning (perencanaan), conducting (melakukan review) dan reporting (pelaporan). Pencarian literature dalam penelitian ini dilakukan dengan pemilihan artikel dari beberapa database akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-budgeting pada Pemerintah kota Surabaya layak untuk dilanjutkan karena terbukti berjalan secara efektif bila ditinjau dari sembilan asas good governance dengan model penilaian empat komponen CIPP. Pada komponen pertama, konteks (context), pencapaian implementasi e-budgeting dalam transparansi dan akuntabilitas anggaran. Selanjutnya ditinjau dari masukan (input), sarana dan prasarana yang digunakan sudah memadai serta SDM yang sudah ada peningkatan. Ditinjau dari proses (process), e-Budgeting menjawab kendala dalam proses penyusunan anggaran dari kesalahan input dan proses penyusunan RKA. Serta, ditinjau dari output (product), e-Budgeting meningkatkan kualitas pengembangan indikator dalam mewujudkan good governance.

Kata kunci : E-Budgeting, Good Governance, CIPP.

Abstract

The EDGI position in Indonesia is in the range of 0.25 - 0.58 (middle-EDGI), this is certainly a demand for the government to find reliable solutions. Along with the

development of the industrial era 4.0. This study aims to describe, analyze, determine the effectiveness of the implementation of e-budgeting, its operational processes and how to evaluate the fulfillment of good governance principles with the CIPP method. This study uses descriptive qualitative methods with the aim of identifying, evaluating, and interpreting previous research that is relevant to the topic. This descriptive qualitative is through the assessment of the CIPP model (Context, Input, Process and Product) in realizing good governance which is carried out by planning, conducting (conducting a review) and reporting (reporting). The literature search in this research was started by selecting articles from academic databases. The results of the study indicate that the implementation of e-budgeting in the Surabaya city government is feasible to continue because it has been proven to run effectively when viewed from the nine principles of good governance with the assessment model of four CIPP components. In the first, context, the implementation of e-Budgeting has succeeded in achieving its initial goals, namely budget transparency and accountability. Furthermore, in terms of input, the use of facilities and infrastructure as well as human resources is adequate. In terms of the process, e-Budgeting simplifies and minimizes errors in the RKA preparation process. Also, in terms of output (product), e-Budgeting improves the quality of fulfilling the nine principles of good governance.

Keywords: E-Budgeting, Good Governance, CIPP.

A. Pendahuluan

Demokrasi dalam suatu negara dapat dikatakan maju atau makmur apabila telah memiliki sifat good governance. Good governance merupakan istilah yang digunakan dalam suatu negara dengan sistem transparansi informasi publik yang baik. Hal ini dilakukan untuk menciptakan praktik demokrasi dan good governance, oleh karena itu dibutuhkan kebijakan yang terarah dalam sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemanfaatan ICT (Information Communication and Technology) untuk lebih efisien dan efektif seperti MOOC yang sudah banyak dikembangkan.¹

Sejalan hal tersebut sesuai dengan undang-undang yang terdapat pada No. 14 tahun 2008 yang mana tentang keterbukaan dalam menyampaikan dan menyediakan informasi publik secara substansial yang berada di bawah kewenangannya dengan tujuan untuk memberikan suatu jaminan konstitusional². Melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 dikeluarkan

¹ Meina Zhu, Annisa Sari, and Mimi Miyong Lee, "A Systematic Review of Research Methods and Topics of the Empirical MOOC Literature (2014-2016)," *The Internet and Higher Education* 37 (April 2018): 31-39, <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2018.01.002>.

² Syukriy Abdullah, "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah," n.d., 2.

kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan e-Government yang mana kemajuan teknologi dan informasi yang pesat dan potensi pemanfaatannya secara luas, yang menyatakan bahwasanya setiap Gubernur dan Bupati/Wakikota diamanatkan untuk mengambil suatu langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing demi terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional. E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Government juga bisa dikenal dengan kata e-gov, online pemerintah, pemerintah digital atau pemerintah transformasi³.

Realita di Indonesia walaupun sudah menggunakan sistem e-Government masih dinilai belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari e-Government Development Index (EGDI) atau bisa disebut dengan indeks pembangunan e-Government yang mana memiliki kisaran nilai antara 0,25 sampai dengan 1,00. Posisi EDGI di Indonesia berada pada kisaran 0,5258 (middle-EDGI) atau disebut juga dengan indeks pembangunan menengah. Sedangkan Negara-negara maju seperti, Singapura, Jepang, dan Israel memiliki EDGI dengan kisaran 0,75 - 1,00 (high-EDGI). EDGI di Indonesia masih tertinggal dari negara-negara maju tersebut karena penggunaan sistem informasi yang tidak maksimal dalam proses pengelolaan pemerintahan, sehingga menyebabkan tidak adanya efektivitas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik.⁴Selain itu, kemungkinan sebab terjadinya kesalahan dalam mengelola sumber daya yang mana dimiliki oleh pemerintah saat ini khususnya proses pengelolaan keuangan akan semakin meningkat. Melihat kekurangan tersebut terciptalah implementasi perwujudan dari e-Government, yaitu e-Budgeting. Penggunaan e-Budgeting sangat penting dalam rangka mewujudkan e-Governant yang sesuai dengan asas-asas good governance. E-Budgeting bisa juga dapat meringkas proses-proses yang ada sama halnya seperti mempersiapkan data standar kemudian harga satuan, pembagian bagian anggaran, dan merancang usulan-usulan kegiatan beserta rincian anggarannya oleh setiap

³ Indrawati Yuhertiana, "Behavioural Public Sector Accounting Research In Indonesia: A Literature Review" 14, no. 1 (2015): 16.

⁴ Farhan Permaqi, "E-Budgeting Dalam Keuangan Negara Dan Keuangan Daerah (E-Budgeting On State Budget And Regional Budget)," n.d., 23.

masing-masing unit satuan kerja ⁵, pembahasan internal maupun dengan DPRD, setelah adanya revisi baik satu kali atau lebih terciptalah keputusan sesuai dengan kesepakatan semua pihak yang pada akhirnya akan mengarah pada pembangunan sebagai salah satu bentuk inovasi dalam meningkatkan kontribusi dan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien karena dalam literatur yang menyampaikan bahwa situs www.kemendagri.go.id, dipublikasikan pada bulan Juli 2013 bahwa dari 530 pemerintah daerah baik tingkat provinsi, kotamadya maupun kabupaten se-Indonesia terdapat 485 (92%) situs web pemerintah daerah yang aktif, 25 (5%) tidak ada situs resmi, 20 (4%) situs web offline⁶.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem e-Budgeting merupakan bentuk sistem penganggaran berbasis online yang mengintegrasikan perancangan, pengelolaan hingga evaluasi dengan tujuan untuk membangun keselarasan keuangan pemerintah dengan misi dapat diawasi dengan baik sehingga proses pengawasan menjadi efektif dan efisien. Bagi para aparatur pemerintah kota Surabaya, penerapan ini dianggap sebagai motivasi baru dalam mengelola administrasi pemerintahan karena berdasarkan informasi implementasi sistem penganggaran sebelumnya dinilai tidak mudah dan kurang efisien. Berbagai suatu keunggulan yang ditawarkan tentu menjadi prestasi tersendiri untuk pemerintah Kota Surabaya. Skenario penerapan sistem e-Budgeting dinilai sangat strategis untuk ditelisik lebih jauh. Seperti paragraf yang dijelaskan di atas bahwa, sistem e-Budgeting itu merupakan suatu jawaban dari konsepsi good governance yang mana dipraktekkan langsung dalam sistem (best practices). Adanya sistem e-Budgeting ini dilakukan untuk mendorong aparatur pemerintah untuk semakin bekerja lebih efektif efisien dan berintegrasi karena dilandasi oleh norms and values.

Implementasi good governance harus dibahas secara menyeluruh dengan merujuk pada good governance yang baik, sehingga bisa diperoleh hasil yang lebih menyeluruh terhadap implementasi kebijakan sistem penganggaran. Seperti yang

⁵ Rindu Rika Gamayuni and Elia Agusta, "E-Planning and E-Budgeting Implementation: A Qualitative Study in Lampung Province," *International Journal of Economics, Business, and Entrepreneurship* 2, no. 2 (December 23, 2019): 105, <https://doi.org/10.23960/ijebe.v2i2.54>.

⁶ Melkior N. N. Sitokdana, "Evaluasi Implementasi eGovernment Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura," *Jurnal Buana Informatika* 6, no. 4 (October 31, 2015), <https://doi.org/10.24002/jbi.v6i4.461>.

dijelaskan oleh Rizka Khoirunnisak dkk, bahwasanya yang terdapat dalam tulisan mengenai “Penerapan E-Budgeting Pemerintah Kota Surabaya Dalam mencapai Good Governance”, dalam Call for Papers Ekonomi dan Bisnis, yang mana setiap penelitian itu tentunya memiliki gambaran secara praktikal Jember, (2017: 252). Namun, keterbatasan dalam penelitian-penelitian terdahulu adalah belum terintegrasinya konsep good governance sebagai objek yang diteliti. Selain itu, penelitian tersebut mengkaji asas-asas dalam good governance hanya dijadikan konsep saja karena realitanya ruang lingkup pembahasannya hanya memakai satu atau dua asas (transparansi dan akuntabilitas) dan penelitian-penelitian terdahulu masih digambarkan secara parsial bukan praktikal. Celah dalam penelitian tersebut yang belum terjawab oleh penelitian-penelitian terdahulu ditawarkan untuk diselesaikan oleh penulis melalui penerapan e-Budgeting ini. Untuk itu, implementasi dari e-Budgeting sudah seharusnya menggunakan kaidah-kaidah asas good governance secara keseluruhan. Atas dasar itu, penelitian ini akan membahas mengenai implementasi e-Budgeting dalam keselarasannya dengan asas-asas good governance di kota Surabaya dengan model CIPP (Context, Input, Process dan Product). Kebaruan (novelty) dari penelitian ini adalah inovasi implementasi e-Budgeting di Surabaya dengan model CIPP dan mengupayakan integrasi konsep asas-asas good governance secara keseluruhan dan digambarkan secara praktikal.

B. Metodologi Penelitian

Dalam pengertian secara luas metode disini dianggap sebagai cara cara, untuk memahami realita atau memahami langkah sistematis untuk memecahkan hubungan sebab akibat. Adapun metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, ⁷yaitu dengan memaparkan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual menyusun atau mengklasifikasinya, menganalisis, dan menginterpretasikannya. ⁸Analisis metode deskriptif dilakukan dengan metode konseptual dan berbagai cara yang mana

⁷ Theresia Lulu Indah Kurniawati, Mochamad Chandra Saputra, and Aditya Rachmadi, “Identifikasi dan Analisis Kualitatif Risiko Sistem E-Budgeting dan E-Procurement,” n.d., 9.

⁸ Sri Nur Hari Susanto, “Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (June 11, 2019): 47, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.205-217>.

mendeskripsikan fakta-fakta yang ada berdasarkan data annual report yang terjadi pada pemerintah kota Surabaya maupun informasi yang akurat di berbagai media dan riset yang terkait sebelumnya yang kemudian disusun analisis sesuai dengan tujuan akhir penulisan. Dalam amatan ini tidak hanya menguraikan satu fakta saja atau fakta yang ada, akan tetapi juga memberikan pemahaman penjabaran terhadapnya dan memberikan penjelasan yang secara rinci⁹. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan pendekatan kualitatif dengan model CIPP oleh Stufflebeam, dimana penelitian ini berfokus pada deskripsi implementasi sistem e-Budgeting pada Pemerintah kota Surabaya dengan alat analisis.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder ini merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang mana dapat melalui media perantara. Media perantara data sekunder yaitu melalui buku-buku, jurnal, artikel, blog-blog resmi dan dari data akademik atau data laporan yang kami jadikan acuan dan informasi-informasi dari sumber-sumber resmi yang khususnya berkaitan dengan e-budgeting. Metode data sekunder sama seperti metode penggunaan bahan dokumen karena dalam hal tersebut, tidak secara langsung peneliti mengambil data sendiri, akan tetapi peneliti meneliti dan memanfaatkan data yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain sama halnya dalam pengakuntansian. Data yang telah terkumpul merupakan suatu fakta yang dikumpulkan, dicatat, di analisis dan nantinya akan diolah sehingga data tersebut akan menghasilkan informasi yang berguna dan benar-benar dibutuhkan oleh peneliti¹⁰.

C. KAJIAN TEORI

1. E-Budgeting

a. Pengertian *E-Budgeting*

Sistem *E-Budgeting* adalah bagian dari awal keberadaan e-Government di Pemerintah Kota Surabaya, melalui konsep GRMS (Government Resource

⁹ Rizka Khoirunnisak and Desy Arishanti, "Penerapan E-Budgeting Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mencapai Good Governance," 2017, 8.

¹⁰ Mohamad Apip and Dendy Syaiful Akbar, "Pengantar Akuntansi," n.d., 289.

Management System) ¹¹. Sistem *E-Budgeting* adalah sistem kinerja anggaran yang terdapat aplikasi program computer dengan fasilitas layanan web untuk membantu penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Revisi, dan PAK (Perubahan Anggaran Kegiatan) Pemerintah Kota Surabaya.

b. Tujuan *E-Budgeting*

Memberikan kemudahan dalam proses penyusunan APBD, revisi dan PAK (Perubahan Anggaran Kegiatan) di Pemerintah Kota Surabaya dan menghindari kesalahan-kesalahan input didalamnya. ¹²

c. Ruang Lingkup

1. Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Analisa Standar Belanja (ASB).
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sehingga menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
3. Revisi DPA SKPD
4. Penyusunan Perubahan APBD (PAK).

2. Good Governance

a. Pengertian Good Governance

Governance dalam bahasa Inggris berarti tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan, dimana sebagai langkah dalam perkembangan sumber daya . Menurut Kooiman bahwa governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Sampai saat ini, kebanyakan pakar dalam Lembaga maupun organisasi mendefinisikan istilah good governance berbeda-beda, akan tetapi semuanya dimaksudkan dalam tujuan pencapaian pemerintahan yang baik sebagai inovasi kebijakan dalam prasyarat utama organisasi sektor publik harus mendapatkan perhatian yang serius dari stakeholder kebijakan mulai dari level organisasi

¹¹ Adila and Dahtiah, "Evaluasi Penerapan Sistem E-Budgeting dengan Pendekatan Human Organization Technology Fit Model pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat."

¹² Aulia Antika Wahyulita, "Implementasi Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik Pada Skpd Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Di Upt. Rehabilitas Sosial Bina Netra Malang," N.D., 14.

terendah sampai organisasi level top. Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan bahwa wujud *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat¹³.

Selanjutnya *OECD* dan *World Bank* mengartikan *good governance* adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan sosial dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan mencegah kasus korupsi baik secara politik dan administratif, pendisiplinan anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum untuk pertumbuhan aktivitas kewiraswastaan.

b. Asas-Asas Good Governance

Prinsip-prinsip/asas-asas yang terkandung dalam *good governance* pada hakikatnya merupakan nilai-nilai etis atau norma hukum yang menjadi tolok ukur terhadap pelaksanaan kinerja pemerintahan yang baik guna mewujudkan tujuan negara serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut *Willem Konijnenbelt* yakni kedudukan asas/prinsip *good governance* dalam sistem hukum merupakan hukum tidak tertulis¹⁴. Bagi *Philipus M. Hadjon*, prinsip/asas *good governance* harus dijadikan pedoman dalam norma-norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari prinsip/asas *good governance* bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat pula dikatakan, bahwa prinsip/asas *good governance* adalah asas-asas hukum yang tidak tertulis, dimana dalam keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diimplementasikan. Dalam realitanya prinsip/asas *good governance* ini walaupun dimaksudkan dalam asas, akan tetapi tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak, serta dalam beberapa hal ada sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang.

¹³ Dr H Yusri Munaf and Sh M Hum, “Hukum Administrasi Negara,” n.d., 63-68.

¹⁴ Susanto, “Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi.”

Pelaksanaan pemerinatahan yang baik dapat berpedoman kepada asas umum penyelengga negara, yang terdiri atas ¹⁵:

- 1) Asas kepastian hukum;
- 2) Asas tertib penyelenggara negara;
- 3) Asas kepentingan umum;
- 4) Asas keterbukaan;
- 5) Asas proporsionalitas;
- 6) Asas profesionalitas;
- 7) Asas akuntabilitas;
- 8) Asas efisiensi;
- 9) Asas efektifitas ¹⁶.

3. Model CIIP (Context, Input, Proses, and Product)

CIPP ialah sebuah model evaluasi yang memakai pendekatan yang berorientasi di manajemen (management-oriented evaluation approach) atau dianggap sebagai bentuk penilaian manajemen program (evaluation in acara management). Model CIPP berpijak pada pandangan bahwa tujuan terpenting dari evaluasi program bukanlah membuktikan (to prove), melainkan menaikkan (to improve). Karena itu, model ini juga dikategorikan pada pendekatan evaluasi yang berorientasi pada peningkatan program (improvement-oriented evaluation), atau bentuk evaluasi pengembangan (evaluation for development). Artinya, model CIPP diterapkan dalam rangka mendukung pengembangan organisasi dan membantu pemimpin serta staf organisasi menerima dan memakai masukan secara sistematis supaya lebih bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan krusial atau, minimal bekerja sebaik-baiknya dengan asal daya yang terdapat. ¹⁷

¹⁵ J. M. Sargeant and A. M. O'Connor, "Introduction to Systematic Reviews in Animal Agriculture and Veterinary Medicine," *Zoonoses and Public Health* 61 (June 2014): 3-9, <https://doi.org/10.1111/zph.12128>.

¹⁶ Administrative Science in the Faculty of Administrative Sciences, Brawijaya University, Malang, Indonesia et al., "Policy Determination in E-Budgeting Implementation by the Government of DKI Jakarta - Indonesia," *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (December 31, 2020): 149-67, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.19>.

¹⁷ Ihwan Mahmudi, "CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan" 6, no. 1 (2011): 15.

Tetapi, model CIPP tidak lepas dari sejumlah kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut merupakan (1) karena terfokus pada berita yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan dan stafnya, evaluator boleh jadi tidak responsif terhadap persoalan-persoalan atau informasi-informasi yang signifikan; (2) hasil evaluasi ditujukan pada para pemimpin taraf atas (top management), sebagai akibatnya model ini bisa jadi tidak adil serta tidak demokratis; dan (3) model CIPP itu kompleks serta memerlukan banyak dana, waktu, serta sumber daya lainnya.¹⁸

contoh CIPP memiliki empat unsur yg berkesinambungan. Pertama, evaluasi konteks utamanya mengarah pada identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi dan pada pemberian masukan buat memperbaiki organisasi. Tujuan utama dari evaluasi konteks artinya menilai semua keadaan organisasi, mengidentifikasi kelemahannya, menginventarisasi kekuatannya yang bisa dimanfaatkan buat menutupi kelemahannya, mendiagnosis persoalan-persoalan yang dihadapi organisasi, serta mencari solusi penyelesaiannya. Evaluasi konteks juga bertujuan buat menilai apakah tujuan-tujuan dan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan para pihak yang menjadi sasaran organisasi.

Kedua, evaluasi input istimewa dimaksudkan untuk membantu menentukan program untuk melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Evaluasi input mencari kendala dan potensi sumber daya yang tersedia. Tujuan utamanya ialah membantu klien menelaah alternatif-alternatif yang berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi serta target organisasi. Dengan kata lain, evaluasi input berfungsi buat membantu klien menghindari inovasi-inovasi yang sia-sia serta diperkirakan akan gagal atau sekurang-kurangnya menghambur-hamburkan sumber daya.

Ketiga, evaluasi proses intinya menyelidiki pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan. Tujuannya ialah memberikan masukan bagi pengelola atau manajer dan stafnya tentang kesesuaian antara pelaksanaan rencana dan jadwal yang sudah dibuat sebelumnya dan efisiensi penggunaan sumber daya

¹⁸ Sargeant and O'Connor, "Introduction to Systematic Reviews in Animal Agriculture and Veterinary Medicine."

yang ada. Apabila rencana tersebut perlu dimodifikasi atau dikembangkan, evaluasi proses menyampaikan petunjuknya. Terdapat tujuan-tujuan lain yang patut diperhatikan, yakni menilai secara periodik seberapa jauh penerimaan para partisipan program serta keberhasilan mereka dalam melaksanakan peran-peran mereka; serta memberikan catatan yang lengkap mengenai pelaksanaan rencana dan perbandingannya dengan tujuan awalnya¹⁹. Evaluasi proses bisa meninjau kembali planning organisasi dan evaluasi-evaluasi terdahulu buat mengidentifikasi aspek-aspek krusial dari organisasi yang harus dimonitor. Yang mesti diingat ialah bahwa evaluasi proses utama bertujuan buat memastikan prosesnya. penyimpangan-penyimpangan dari rencana semula yang dijelaskan. Fungsi utama dari penilaian proses ialah memberikan masukan yang dapat membantu staf organisasi menjalankan acara sesuai dengan rencana, atau mungkin memodifikasi rencana yang ternyata jelek. Pada gilirannya, evaluasi proses menjadi sumber informasi yang penting buat menafsirkan hasil-hasil evaluasi produk. Keempat, evaluasi produk bertujuan buat mengukur, menafsirkan, dan menilai capaian-capaian program. Detailnya, evaluasi produk bertujuan buat menilai keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan target program. Evaluasi-evaluasi tentang keberhasilan program atau organisasi ini dikumpulkan dari orang-orang yang terlibat secara individual atau kolektif, kemudian dianalisis. Artinya, keberhasilan atau kegagalan program dianalisis dari aneka macam sudut pandang. Langkahnya dapat diawali menggunakan menilai kinerja organisasi berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang sudah didiagnosis sebelumnya. Berikutnya, evaluasi produk juga memeriksa dampak-dampak program, baik yang sesuai dengan tujuan serta maksud program maupun tidak, yang positif maupun negatif. Evaluasi produk kerap kali diperluas menggunakan menilai dampak-dampak jangka panjang dari program. Fungsi akhirnya ialah memilih

¹⁹ Maurizio Massaro, John Dumay, and James Guthrie, "On the Shoulders of Giants: Undertaking a Structured Literature Review in Accounting," *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 29, no. 5 (June 20, 2016): 767–801, <https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2015-1939>.

apakah program atau organisasi perlu dilanjutkan, diulang, serta/atau dikembangkan pada tempat-tempat lain, atau sebaliknya dihentikan.²⁰

D. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi E-Budgeting di Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Good Governance

NO	NAMA	JUDUL	HASIL
1	Hendra Wijayanto (2015)	Tranparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Penerapan E-Budgeting	Keberhasilan dalam sistem e-budgeting bertujuan pada transparansi, efektifitas dan pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang efektif. Sehingga e-budgeting ini merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat dependent.
2	Dimas Rizky Gunawan (2016)	Penerapan Sistem E-Budgeting terhadap Transparansi, Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surabaya)	Implementasi e-budgeting berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur operasional standar. Karena dalam pencapaian akuntabilitas pemerintah sudah berupaya secara menyeluruh dalam penganggaran dan seluruh kegiatan. Dalam perwujudan transparansi dapat dibuktikan dengan

²⁰ Serena Santis, Giuseppe Grossi, and Marco Bisogno, "Public Sector Consolidated Financial Statements: A Structured Literature Review," *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 30, no. 2 (January 1, 2018): 230-51, <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2018-0017>.

			masyarakat yang dapat mengakses informasi mengenai anggaran.
3	Rizka Khoirunnisak, Desy Arishanti, Dadeka Vebrianti (2017)	Penerapan E-Budgeting Pemerintah Kota Surabaya dalam Mencapai Good Governance	Kesuksesan pencapaian e-budgeting di kota Surabaya dijadikan acuan untuk pemerintahan kota lainnya. Karena dalam pencapaian system e-budgeting pemerintah kota Surabaya melaksanakan pengembangan dan perbaikan system, kualitas SDM dan inovasi-inovasi lainnya dalam mncapai indicator-indikator dalam good governance.

Dalam penelitian diatas dapat disimpulkan secara keseluruhan pemerintah kota Surabaya sudah melaksanakan sistem penganggaran dengan e-budgeting dengan tujuan untuk mencapai indikator good governance, sehingga menurut informasi terkait, Provinsi Jawa Timur adalah pionir terkait penerapan sistem e-budgeting yaitu Ibu Kota dari provinsi tersebut, Kota Surabaya. Keberhasilan pengimplementasian e-budgeting yang diterapkan oleh kota Surabaya menjadi bukti dalam perwujudan good governance. Selain itu, pemerintah Kota Surabaya juga mendapatkan berbagai penghargaan terkait penerapan e-budgeting guna menunjang pelayanan birokrasi. Karena kota Surabaya sudah dikenal dengan kota penuh inovasi, efisiensi, serta keunggulan dalam pengelolaan manajemen proyek di pusat data. Setiap fasilitas teknologi informasi tersebut dapat dirasakan seluruh masyarakat Surabaya secara gratis agar mewujudkan

pelayanan dan data informasi secara transparan, akuntabel dan mengurangi batas birokrasi²¹.

Berdasarkan proses implementasi sistem e-budgeting pada kota Surabaya sudah berhasil sesuai dengan SOP yang dirumuskan oleh Walikota serta Sekretaris Daerah bersama Tim Anggaran. Dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Namun, penggunaan e-budgeting ini belum dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Dengan kendala hal itu, namun masyarakat bisa mengakses informasi terkait pengelolaan anggaran melalui website-website dari BAPPEDA, PPID, DPRD, BPKAD atau bahkan situs pemerintahan transparansi pengelolaan anggaran lainnya. Diharapkan dengan adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat dapat memberikan aksesibilitas dan keterbukaan informasi dalam proses anggaran. Dengan demikian tercipta peran sesungguhnya masyarakat agar ikut serta dalam penyusunan rencana kegiatan Pemerintahan Kota Surabaya.²²

Implementasi e-budgeting pemerintahan kota Surabaya dalam kesesuaian indikator dalam good governance, adalah sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum dan Asas tertib penyelenggara negara

E-Budgeting merupakan system kinerja berbasis elektronik yang diarahkan oleh pemerintah kepada setiap otonomi daerah untuk penyelenggaraan tata tertib negara sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2005 mengenai kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government, Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005²³ dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pmendagri) No. 13 tahun 2006 mengenai pengelolaan keuangan daerah yang lebih maju, dan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 tahun 2021 tentang pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemerintah daerah provinsi

²¹ Gunawan, "Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya)."

²² Nurul Lathifah, "Rancangan Database E-Budgeting: Upaya Pengendalian Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur," n.d., 1213.

²³ Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, Philomena Leung, and James Guthrie, "Reforms in Public Sector Accounting and Budgeting in Indonesia (2003-2015): Confusions in Implementation," *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 29, no. 1 (March 1, 2017): 118, <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-29-01-2017-B005>.

Jawa Timur tahun 2021 dengan menggunakan aplikasi sebagai system informasi (SIPD, e-planning, e-budgeting, sibaku, SMEP, dan simbada).

2. Asas kepentingan umum

Dengan E-Budgeting, standarisasi dan rasionalisasi anggaran belanja di kota Surabaya bisa dikatakan terkendali secara terpusat, adanya sedikit gerakan hubungan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta adanya komunikasi aktif dari pemerintah dan masyarakat (atau sebaliknya) mengenai transparansi anggaran. Pemerintahan kota Surabaya dalam hal ini harusnya menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain yang memang mampu menerapkan kebijakan E-Budgeting.

3. Asas keterbukaan;

Seiring dengan berkembangnya sistem teknologi informasi, pemerintah melakukan inovasi system kinerja anggaran berbasis elektronik yaitu sebuah sistem keuangan yang disimpan secara online dengan tujuan transparansi bagi setiap pihak. Di kota Surabaya sudah menerapkan system ini untuk dokumentasi penyusunan anggaran agar dapat mencegah kegelapan dana atau kecurangan.

4. Asas proporsionalitas;

Dalam data resmi, tercatat hanya beberapa pemerintahan kota yang mengimplementasikan e-budgeting. Pada tahun 2017, tercatat sembilan pemerintahan daerah yang menerapkan e-Budgeting dalam rangka e-Government. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, menyatakan bahwa e-Budgeting dibuktikan bisa mengefisiensi anggaran, sejauh ini sekitar 14 Triliun rupiah diprediksi bias diefisiensi dengan implementasi sistem tersebut. Pemerintah kota Surabaya sebagai provinsi contributor penerimaan tertinggi di Indonesia. Sehingga tuntutan atas pengelolaan keuangan yang bersih menjadi lebih tinggi. Dan proporsional.

5. Asas profesionalitas;

Anggaran berbasis kinerja ini memiliki manfaat yang jelas karena adanya sikap profesional karena adanya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kinerja e-budgeting di Surabaya sudah menuntut untuk memperluas anggaran yang dapat dilihat akan pemanfaatannya agar

hemat, berdaya guna, dan tepat guna. Melalui proses penganggaran berbasis kinerja, Surabaya menetapkan keluaran dan hasil dari masing-masing program dan kegiatan pelayanan dengan target pencapaian yang diharapkan. Dengan demikian, pengeluaran anggaran bisa diprioritaskan dan unit kerja dapat akuntabel atas hasil yang dicapai.

6. Asas akuntabilitas;

Dalam rangka pertanggungjawaban publik, Surabaya dalam menerapkan e-budgeting bisa mengoptimalkan anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Surabaya mempunyai tantangan untuk menunjukkan bahwa sebagai pihak yang bertanggungjawab akan “kepentingan rakyat” Surabaya harus memposisikan dirinya pada posisi yang tepat.

Namun, realita mengenai partisipasi masyarakat dalam proses transparansi APBD ternyata masih rendah. Seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya tahun 2015 sampai saat ini yang sudah diserahkan ke DPRD, masih menimbulkan beberapa masalah, salah satunya adalah rendahnya tingkat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya. Dan setelah dicermati lebih lanjut, kendalanya adalah kurangnya partisipasi masyarakat yang menyebabkan pelaksanaan APBD tidak dapat berjalan optimal.”²⁴

7. Asas efisiensi dan efektifitas;

Salah satu solusi yang menawarkan peningkatan kinerja pelayanan publik yang didasarkan pada good governance ialah implementasi e-Government. E-government ini bertujuan mentransformasikan seluruh kegiatan agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisien. Konsep e-government ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah kota Surabaya, mulai dari pengadaan barang dan jasa, penilaian dan perekrutan aparat, administrasi pajak, sistem online layanan administrasi, serta pengelolaan anggaran.

Dalam hal anggaran, pemanfaatan e-government sebagai bentuk memfasilitasi pemerintah dalam merencanakan dan merealisasikan anggaran.

²⁴ Atik Andhayani, “Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: E-Budgeting untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah,” *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen* 4, no. 2 (April 30, 2020) hal. 187., <https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.005>.

Pengelolaan anggaran berbasis teknologi informasi atau e-budgeting diyakini mampu mengurangi kecurangan yang terjadi pada proses penganggaran, baik dari segi perencanaan maupun alokasi sehingga akuntabilitas publik bisa lebih ditingkatkan begitu ungkapannya. E-budgeting ini mendorong pemerintah agar lebih transparan dalam mengelola dana publik. Tuntutan-tuntutan permasalahan bisa terselesaikan satu persatu dari good governance bisa dijawab dengan e-budgeting.

2. Evaluasi Implementasi E-Budgeting Pemerintahan Kota Surabaya

- a. Hasil evaluasi konteks menunjukkan bahwa implementasi e-Budgeting pada Pemerintah kota Surabaya telah mencapai sasaran, yaitu untuk mewujudkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pada proses perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (ABPD) serta memperbaiki sistem sebelumnya, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Pada tahap evaluasi konteks selain tujuan yang menjadi fokus utama yaitu adanya korelasi implementasi e-Budgeting dengan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah, dari hasil analisis dibuktikan bahwa penerapan e-Budgeting sudah sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2005 mengenai kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government, Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) No. 13 tahun 2006 mengenai pengelolaan keuangan daerah yang lebih maju, dan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 tahun 2021 tentang pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemerintah daerah provinsi Jawa Timur tahun 2021 dengan menggunakan aplikasi sebagai system informasi (SIPD, e-planning, e-budgeting, sibaku, SMEP, dan simbada). Sehingga e-budgeting ini merupakan paradigma perubahan system yang lama dengan sistem baru.
- b. Sedangkan dalam evaluasi input menunjukkan implementasi e-Budgeting pada Pemerintah kota Surabaya dilihat dari aspek infrastruktur teknologi informasi dan infrastruktur manusia dapat dikatakan sudah sesuai. Dari segi infrastruktur teknologi informasi pada penyediaan sarana dan prasarana yang digunakan baik Hardware dan Software sudah memadai, mungkin hanya adanya adanya perbaikan terhadap server karena bila nanti server digunakan

dalam satu waktu oleh TPAD, maka system e-budgeting akan mengalami kendala penggunaan yang overload. Selanjutnya, hasil evaluasi input dari aspek infrastruktur manusia, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan pelatihan kepada pengguna e-Budgeting yaitu Bappeda, BPKD, serta kepada SKPD/UKPD dan menjadi percontohan bagi pemerintah daerah lainnya²⁵. Hasil evaluasi input ini juga menunjukkan bahwa kota Surabaya selalu melakukan sosialisasi berkaitan dengan fitur-fitur atau inovasi-inovasi yang baru untuk menyempurnakan sistem e-Budgeting ini, inovasi yang dilakukan tidak selamanya berasal dari konsultan atau developer tetapi inovasi yang ada terkadang dari pengguna itu sendiri karena adanya kebutuhan khusus dilapangan sehingga diperlukan inovasi yang lain.

- c. Hasil evaluasi proses menunjukkan secara teknis implementasi e-Budgeting pada Pemerintah kota Surabaya yang sudah berjalan sejak 2013 dan bergerak dalam perkembangan serta berinovasi sesuai kebijakan dan permasalahan yang muncul, sehingga pada akhirnya dapat memberikan manfaat sampai saat ini. Evaluasi proses dalam implementasinya untuk penerapan e-Budgeting pada proses pengelolaan keuangan daerah memberikan dampak yang positif. Karena dampak dari penggunaan e-budgeting TPAD terbantu dan mudah dalam Menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD/UKPD serta dengan e-budgeting ini kesalahan-kesalahan yang dimungkinkan dalam proses penyusunan APBD bisa diminimalisir. Bagi BPKD dan Bappeda, e-Budgeting sebagai inovasi karena dalam proses evaluasi perencanaan setiap SKPD/UKPD tidak menutup kemungkinan adanya ketidaksesuaian dengan perencanaan, selain itu juga keamanan data yang lebih terjaga. Pemerintah kota Surabaya mengawasi terhadap pelaksanaan, sehingga sering dilakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap sistem e-Budgeting, karena monitoring dan evaluasi dirasa penting untuk perkembangan sistem kedepannya. Hasil evaluasi proses menunjukkan e-Budgeting yang digunakan Surabaya yang memiliki kurang lebih 72 SKPD. Hal yang perlu diperhatikan dari temuan evaluasi proses adalah penyiapan

²⁵ Diah Wahyuningsih and Eko Priyo Purnomo, "Studi Komparasi: Penerapan E-Government di Korea Selatan dan Indonesia," *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 5, no. 2 (June 27, 2020): 37, <https://doi.org/10.33506/jn.v5i2.822>.

Standar Operasional Prosedur (SOP), pemerintah kota Surabaya dalam implementasi e-Budgeting pada penerapannya masih menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 14 mengenai pembagian tugas dan wewenang, untuk SOP yang diberlakukan secara legal masih pada tahap penyusunan²⁶.

- d. Hasil evaluasi produk atau output mengungkapkan bahwa dengan implementasi e-Budgeting pada Pemerintah kota Surabaya, sistem ini sangat membantu pada proses penyusunan RKA yang nilai dan komponen di dalamnya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil evaluasi produk lainnya menunjukkan dengan menggunakan e-Budgeting proses penyusunan anggaran lebih singkat dan tepat waktu ²⁷, meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam hal penyiapan anggaran belanja daerah, meningkatkan asas dalam good governance diantaranya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi anggaran. Pengungkapan hasil evaluasi output dapat dilihat dari dua sisi, yaitu efektivitas dan efisiensi. Sisi efektivitas yang dicapai dari e-Budgeting adalah Surabaya dalam menerapkan e-budgeting bisa mengoptimalkan anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Surabaya mempunyai tantangan untuk menunjukkan bahwa sebagai pihak yang bertanggungjawab akan “kepentingan rakyat” Surabaya harus memposisikan dirinya pada posisi yang tepat.

Penutup

Dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi e-Budgeting pada Pemerintah kota Surabaya layak untuk dilanjutkan karena terbukti berjalan secara efektif bila dilihat dari prespektif model CIPP dengan pemenuhan asas dalam good governance, dimana Surabaya menunjukkan bahwa implementasi e-budgeting berpengaruh terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas,

²⁶ Faiz Marwan Prayoga and Indrawati Yuhertiana, “Studi Literatur Faktor yang Mempengaruhi Implementasi E-Budgeting dalam Sektor Publik,” *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 5, no. 2 (May 30, 2020): 78, <https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n2.p68-79>.

²⁷ Wahyu Setyawan and Rindu Rika Gamayuni, “The Quality of Financial Reporting and Internal Control System before and after the Implementation of E-Budgeting in Indonesia Local Government,” *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, March 17, 2020, 22–31, <https://doi.org/10.9734/ajeba/2020/v14i330194>.

efisiensi dan efektifitas walaupun anggaran belum bisa terserap secara sepenuhnya. Ditinjau dari konteks (context) yang berfokus terhadap keberhasilan dari pencapaian tujuan awal, telah tercipta transparansi dan akuntabilitas anggaran pada Pemerintah kota Surabaya. Pada komponen yang kedua, yaitu masukan (input), dalam penggunaan infrastruktur teknologi, baik sarana dan prasana sudah dikatakan baik. Akan tetapi masih memiliki kendala pada server yang akan overload bila digunakan dalam satu waktu.

Dalam model penilaian CIPP yang ketiga yaitu Proses (process), hasil dari evaluasi dari tahap ini menyebutkan bahwa dengan menggunakan aplikasi atau sistem e-Budgeting, kemudahan TAPD dalam membantu proses penyusunan RKA serta dampak positif bagi TPAD adalah sistem dalam e-budgeting ini meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam input dan proses penyusunan RKA. Dan terakhir, yaitu hasil (product), hasil evaluasi ini menyebutkan dengan adanya implementasi e-Budgeting pada Pemerintah kota Surabaya merupakan salah satu faktor peningkatan kualitas pengembangan indicator dalam mewujudkan good governance.

Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk terjun lapangan dengan penelitian diseluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Surabaya atau juga bisa penelitian diluar Kota Surabaya. Penelitian selanjutnya diharapkan menjawab pertanyaan Implementasi E-Budgeting bisa menampilkan secara lebih rinci dan jelas, kemudian juga dilakukan pengujian kembali untuk memastikan pertanyaan tersebut valid atau tidak.

Sebaiknya perlu adanya peningkatan kinerja stakeholders dalam implementasi reformasi anggaran, karena hal yang paling dibutuhkan adalah adanya kerjasama positif antara pemerintah, swasta dan masyarakat guna terserapnya segala aspirasi dan informasi dalam mencapai pemerintahan yang Good Governance sesuai dengan mind-set Good Governance Theory.

Referensi atau Daftar Pustaka

Abdullah, Syukriy. "Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah," n.d., 2.

- Adila, Raisa Nur, and Neneng Dahtiah. "Evaluasi Penerapan Sistem E-Budgeting dengan Pendekatan Human Organization Technology Fit Model pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat," 2020, 7.
- Administrative Science in the Faculty of Administrative Sciences, Brawijaya University, Malang, Indonesia, Abdul Hakim, Ondy Asep Saputra, and Choirul Saleh. "Policy Determination in E-Budgeting Implementation by the Government of DKI Jakarta - Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (December 31, 2020): 149-67. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.10.19>.
- Andhayani, Atik. "Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: E-Budgeting untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah." *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen* 4, no. 2 (April 30, 2020). <https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.005>.
- Apip, Mohamad, and Dendy Syaiful Akbar. "Pengantar Akuntansi," n.d., 289.
- Crespo, Cristina, Vicente Ripoll, Carmen Tamarit, and Rodrigo Valverde. "Institutional Characteristics and Managers' Perceptions of Accounting Information: Impact on e-Government Use and Organisational Performance." *Spanish Journal of Finance and Accounting / Revista Española de Financiación y Contabilidad* 47, no. 3 (July 3, 2018): 352-65. <https://doi.org/10.1080/02102412.2017.1416743>.
- Dewata, Evada, Nyayu Miftahul Ilmiyyah, and Sarikadarwati Sarikadarwati. "faktor - faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan tahun 2012-2015." *Jurnal akuntansi, ekonomi dan manajemen bisnis* 5, no. 1 (July 27, 2017): 147. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i1.446>.
- Gamayuni, Rindu Rika, and Elia Agusta. "E-Planning and E-Budgeting Implementation: A Qualitative Study in Lampung Province." *International Journal of Economics, Business, and Entrepreneurship* 2, no. 2 (December 23, 2019): 105-22. <https://doi.org/10.23960/ijebe.v2i2.54>.
- Gunawan, Dimas Rizky. "Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya)." *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 8, no. 1 (October 31, 2016): 72. <https://doi.org/10.26740/jaj.v8n1.p72-102>.

- Jatmiko Wahyu Prabowo, Tri, Philomena Leung, and James Guthrie. "Reforms in Public Sector Accounting and Budgeting in Indonesia (2003-2015): Confusions in Implementation." *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 29, no. 1 (March 1, 2017): 104-37. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-29-01-2017-B005>.
- Khoirunnisak, Rizka, and Desy Arishanti. "Penerapan E-Budgeting Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mencapai Good Governance," 2017, 8.
- Kurniawati, Theresia Lulu Indah, Mochamad Chandra Saputra, and Aditya Rachmadi. "Identifikasi dan Analisis Kualitatif Risiko Sistem E-Budgeting dan E-Procurement," n.d., 9.
- Lathifah, Nurul. "Rancangan Database E-Budgeting: Upaya Pengendalian Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur," n.d., 25.
- Mahmudi, Ihwan. "CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan" 6, no. 1 (2011): 15.
- Maryam, Neneng Siti. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik," no. 1 (2016): 18.
- Massaro, Maurizio, John Dumay, and James Guthrie. "On the Shoulders of Giants: Undertaking a Structured Literature Review in Accounting." *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 29, no. 5 (June 20, 2016): 767-801. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2015-1939>.
- Muflihah, Yusrida, and Tony Dwi Susanto. "[No title found]." *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* 4, no. 4 (December 31, 2017): 304. <https://doi.org/10.25126/jtiik.201744366>.
- Munaf, Dr H Yusri, and Sh M Hum. "Hukum Administrasi Negara," n.d., 136.
- Permaqi, Farhan. "E-Budgeting Dalam Keuangan Negara Dan Keuangan Daerah (E-Budgeting On State Budget And Regional Budget)," n.d., 23.
- Prayoga, Faiz Marwan, and Indrawati Yuhertiana. "Studi Literatur Faktor yang Mempengaruhi Implementasi E-Budgeting dalam Sektor Publik." *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 5, no. 2 (May 30, 2020): 68. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n2.p68-79>.
- Putririnda, Vanda Indhiaura. "Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Pendidikan Sarjana Program Studi Akuntansi," n.d., 16.

- Santis, Serena, Giuseppe Grossi, and Marco Bisogno. "Public Sector Consolidated Financial Statements: A Structured Literature Review." *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 30, no. 2 (January 1, 2018): 230-51. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2018-0017>.
- Sargeant, J. M., and A. M. O'Connor. "Introduction to Systematic Reviews in Animal Agriculture and Veterinary Medicine." *Zoonoses and Public Health* 61 (June 2014): 3-9. <https://doi.org/10.1111/zph.12128>.
- Setyawan, Wahyu, and Rindu Rika Gamayuni. "The Quality of Financial Reporting and Internal Control System before and after the Implementation of E-Budgeting in Indonesia Local Government." *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, March 17, 2020, 22-31. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2020/v14i330194>.
- Sitokdana, Melkior N. N. "Evaluasi Implementasi eGovernment Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura." *Jurnal Buana Informatika* 6, no. 4 (October 31, 2015). <https://doi.org/10.24002/jbi.v6i4.461>.
- Sukarno, Karmila Sari. "Implementasi Prinsip 'Good Governance' Dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2009 Di Kabupaten Karanganyar," 2009, 85.
- Sururi, Ahmad. "Inovasi kebijakan organisasi sektor publik menuju terwujudnya good public policy governance." *Jurnal good governance* 15, no. 1 (August 26, 2019). <https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.96>.
- Susanto, Sri Nur Hari. "Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (June 11, 2019): 205-17. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.205-217>.
- Wahyulita, Aulia Antika. "Implementasi Penerapan Sistem e-budgeting Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik pada SKPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di UPT. Rehabilitas Sosial Bina Netra Malang," n.d., 14.
- Wahyuningsih, Diah, and Eko Priyo Purnomo. "Studi Komparasi: Penerapan E-Government di Korea Selatan dan Indonesia." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 5, no. 2 (June 27, 2020): 37. <https://doi.org/10.33506/jn.v5i2.822>.
- Yuhertiana, Indrawati. "Behavioural Public Sector Accounting Research In Indonesia: A Literature Review" 14, no. 1 (2015): 16.

Zhu, Meina, Annisa Sari, and Mimi Miyoung Lee. "A Systematic Review of Research Methods and Topics of the Empirical MOOC Literature (2014–2016)." *The Internet and Higher Education* 37 (April 2018): 31–39. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2018.01.002>.

Zubaidi, Nabila, Dwi Cahyono, and Astrid Maharani. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan." *International Journal of Social Science and Business* 3, no. 2 (May 22, 2019): 68. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i2.17579>.

[e-Budgeting - Pemkot Surabaya](#) diakses pada tanggal 15 Agustus 2020 andiri, 2018.

"Skema Qardhul Hasan-Penelusuran Google," n.d.